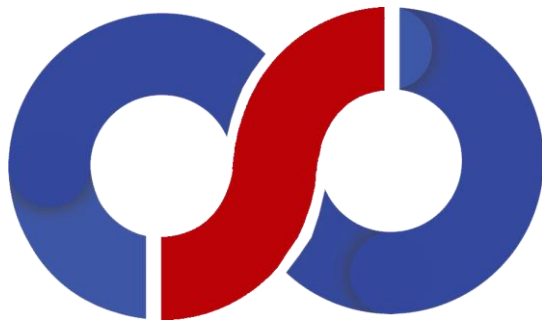


# RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

PT BPR SURYA DANAKARYA  
Periode Tahun 2026



RUKO PANDAAN SQUARE NO.8 JL DRSOETOMO SUMBERGEDANG  
PANDAAN TELEPON: 0343 641721

## Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
1. Ringkasan Eksekutif	1
2. Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	10
3. Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	12
4. Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	19
5. Tindak Lanjut Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	21
Lembar Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan	25
Lampiran-lampiran	26

## Kata Pengantar

Sebagai implementasi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/ POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, BPR menyiapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026. Langkah ini merupakan wujud komitmen terhadap prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam kegiatan operasional perbankan, sekaligus mendukung inisiatif Perbankan Hijau (*Green Banking*).

Penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah sebuah komitmen kolektif di industri jasa keuangan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Implementasi ini krusial bagi keberlanjutan BPR, sebab pengabaian terhadap isu sosial dan lingkungan dapat memperbesar potensi risiko, khususnya risiko kredit yang disebabkan oleh peningkatan gagal bayar. Dengan demikian, pembiayaan yang berkelanjutan memberikan dampak positif terhadap kestabilan finansial BPR SURYA DANAKARYA dalam rentang waktu yang panjang.

Pada tahun 2025 ini, PT. BPR SURYA DANAKARYA menyusun RAKB 2026 untuk ketiga kalinya dengan gambaran pencapaian penyaluran kredit yang masuk dalam Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUB) yaitu penyaluran kredit ke Sektor UMKM dengan pencapaian Rp. 7.694.555.382,00 pada tahun 2023, Rp. 13.330.410.526,00 tahun 2024 dan pada Triwulan III 2025 sebesar Rp.14.017.718.390,00. Untuk kedepannya BPR SURYA DANAKARYA akan terus menambah portofolio pembiayaan ke Sektor UMKM selaras dengan *core business* BPR yang memberikan pembiayaan kepada pengusaha Mikro dan Kecil.

Dalam pembiayaan ke sektor UMKM, BPR SURYA DANAKARYA juga memastikan kredit yang diberikan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dengan melakukan analisis kredit dengan menilai dampak usaha terhadap lingkungan hidup. Hal ini dilakukan dengan menghindari pemberian kredit pada usaha yang berpotensi merusak lingkungan. BPR SURYA DANAKARYA memahami pentingnya keuangan berkelanjutan dan menerapkan prinsip *triple bottom line – People, Planet, and Profit –* dalam operasionalnya, serta menyelaraskan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST).

Memperhatikan urgensi implementasi Keuangan Berkelanjutan untuk BPR, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) ini krusial sebagai panduan bagi seluruh personel BPR dalam menjalankan Keuangan Berkelanjutan. Laporan RAKB ini adalah publikasi ketiga dari Bank terkait RAKB.

Guna mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan bisnis yang solid dan sehat, BPR menyusun program prioritas dan detail RAKB Tahun 2026. Program ini akan dilaksanakan mulai tahun 2026 untuk periode 1 hingga 5 tahun mendatang (2026-2030), dengan menitikberatkan pada sektor UMKM. Hal ini selaras dengan visi dan misi Bank, serta memperhatikan aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dalam operasional bisnis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

## BAB I.

### Ringkasan Eksekutif

#### Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

##### 1.1. Pencapaian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Tahun 2026 merupakan tahap ketiga implementasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Dengan demikian disampaikan Jumlah produk dan nominal penyaluran dana yang memenuhi kriteria kegiatan usaha Berkelanjutan posisi Triwulan III 2025 per 30 September 2025 sesuai pada tabel di bawah ini:

**Tabel Pencapaian Produk Keuangan Berkelanjutan**

Nama Komponen	Posisi Tahun 2024	Realisasi Tahun 2025 (Triwulan 3)	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
a. Jumlah Produk Penghimpunan Dana Berkelanjutan	17.173.681.622	17.126.319.528	17.248.859.418	13.458.375.668
a.1. DPK	17.173.681.622	17.126.319.528	17.248.859.418	13.458.375.668
a.2. Surat Berharga yang diterbitkan	-	-	-	-
b. Outstanding Penghimpunan Dana Berkelanjutan (Rp)	17.173.681.622	17.126.319.528	17.248.859.418	13.458.375.668
b.1. DPK (Rp)	17.173.681.622	17.126.319.528	17.248.859.418	13.458.375.668
b.2. Surat Berharga (Rp)	-	-	-	-
c. Jumlah Penyaluran Dana Berkelanjutan	19.052.729.971	19.292.072.177	20.920.000.000	20.867.076.260
c.1. Kredit	19.052.729.971	19.292.072.177	20.920.000.000	20.867.076.260
c.2. Surat Berharga yang dimiliki	-	-	-	-
d. Outstanding Penyaluran Dana Berkelanjutan (Rp)	19.052.729.971	19.292.072.177	20.920.000.000	20.867.076.260
d.1. Kredit (Rp)	19.052.729.971	19.292.072.177	20.920.000.000	20.867.076.260
d.2. Surat Berharga yang dimiliki (Rp)	-	-	-	-
Total Kredit/Pembiayaan Bank Kepada Pihak Ketiga (Rp)	1,11	1,13	1,21	1,13
Persentase total kredit/ pembiayaan kegiatan usaha berkelanjutan terhadap total kredit/pembiayaan bank (%)	111	113	121	113

**Tabel Outstanding Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan**

Nama Komponen	Baki Debet Posisi Tahun 2024	Baki Debet Tahun 2025 (Triwulan 3)	Target Baki Debet Tahun 2025	Target Baki Debet Tahun 2026
Total outstanding kredit/ pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (Rp)	13.330.410.526	13.567.718.390	15.420.000.000	15.030.276.620
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-

b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	13.330.410.526	13.567.718.390	15.420.000.000	15.030.276.620

**Tabel NPL Gross Kredit/Pembiayaan Berdasarkan Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan**

Nama Komponen	NPL Posisi Tahun 2024	NPL Tahun 2025 (Triwulan 3)	Target NPL Tahun 2025	Target NPL Tahun 2026
NPL Gross kredit/pembiayaan berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan (%)	11,3	21,73	20,9	12,7
a. Energi Terbarukan	-	-	-	-
b. Efisiensi Energi	-	-	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	-	-	-	-
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	-	-	-	-
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	-	-	-	-
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Ecoefficient)	-	-	-	-
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	-	-	-	-
k. Kegiatan Usaha dan/ atau Kegiatan Lain yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	-	-	-	-
l. Kegiatan UMKM	13.330.410.526	13.567.718.390	15.420.000.00	15.030.276.620

## **1.2.** Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan Visi:

Menjadi Bank yang memiliki daya saing dalam pelayanan dengan memperhatikan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup

Misi:

1. Mewujudkan penerapan Keuangan Berkelanjutan yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat
2. Pengembangan kapasitas internal Bank yang sejalan dengan Keuangan Berkelanjutan
3. Membangun Tata Kelola dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko khususnya aspek sosial dan lingkungan hidup.

## **1.3.** Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

1. Mengacu pada POJK No. 51/POJK.03/2017 tertanggal 27 Juli 2017 perihal Keuangan Berkelanjutan, BPR sebagai Lembaga Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan konsep keuangan berkelanjutan secara bertahap. Hal ini mencakup pengintegrasian delapan prinsip utama ke dalam kerangka organisasi, dengan fokus pada keseimbangan antara tiga aspek fundamental: Keuntungan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, dan Kelestarian Lingkungan.
2. Dalam implementasinya, BPR diwajibkan menyusun RAKB yang merupakan dokumen komprehensif menggambarkan rencana kegiatan usaha baik jangka pendek maupun panjang. Dokumen ini mencakup strategi konkret untuk merealisasikan program kerja dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang tepat.
3. Sesuai ketentuan, BPR harus menyusun Laporan Keberlanjutan yang secara menyeluruh mengungkapkan kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan dalam konteks praktik bisnis berkelanjutan.
4. Prosedur ini mengatur secara rinci mekanisme koordinasi antarunit dalam organisasi BPR, meliputi peran strategis Direksi, Bagian Bisnis, Sumber Daya Manusia, Unit Kepatuhan, dan Manajemen Risiko.
5. Untuk mendukung transformasi digital dan implementasi keuangan berkelanjutan, BPR membutuhkan Standar Pedoman Operasional yang komprehensif dan adaptif.

## Program Kerja dan Road Map Aksi Keuangan Berkelanjutan

### 1.4.1. Program Rencana Tahun Depan (Jangka Pendek)

No	Kategori, Jenis, dan Periode Pelaksanaan	Uraian Aktivitas	Target dan Tujuan	Indikator Pencapaian
1	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank) 01 Jan 2026 s/d 31 Des 2026	Mengurangi Penggunaan Kertas	Penghematan dan mendukung program go green	Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2025 dan Peningkatan Utilitas e- office/ email.
2	Pengembangan Kapasitas Intern Bank (Program Pengembangan Pegawai) 06 Jan 2026 s/d 06 Jan 2026	Mengadakan Sosialisasi, Training (inhouse/public course) atau workshop terkait Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) kepada Internal Pegawai	Meningkatkan kompetensi pegawai tentang Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance)	Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai dan / atau target training yang telah ditetapkan.
3	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank) 03 Feb 2026 s/d 03 Feb 2026	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup (Reminder)	Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan	Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.
4	Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko,	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan	Ditunjuknya Unit Kerja (Unit Bisnis) yang mengelola dan/atau

	Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (Penyesuaian Organisasi) 02 Apr 2026 s/d 02 Apr 2026	Berkelanjutan	Berkelanjutan	mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan
5	Pengembangan Kapasitas Intern Bank (Program Pengembangan Pegawai) 01 Jun 2026 s/d 01 Jun 2026	Melakukan evaluasi dan update kebijakan tentang Keuangan berkelanjutan yang telah disusun.	Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang update dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan.	Tersusunnya kebijakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan Keuangan berkelanjutan (Disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisari)
6	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank) 01 Agt 2026 s/d 31 Agt 2026	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan	Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai.	Penurunan penggunaan air minum kemasan dan Penggunaan Tumbler/gelas di setiap Rapat dan Pelatihan.
7	Pengembangan Produk dan/atau Jasa (Kredit) 01 Okt 2026 s/d 31 Okt 2026	Meningkatkan pertumbuhan kredit kepada usaha-usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 1 (satu) % dari portofolio KYD UKM tahun sebelumnya.	Memberantas kemiskinan dan kelaparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.	Bertambahnya pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) yang Berwawasan Lingkungan.
8	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Eksternal Bank) 01 Nov 2026 s/d 30 Nov 2026	Pelaksanaan literasi keuangan dan akuisisi nasabah penyimpan dan debitur yang memiliki usaha masuk kategori berkelanjutan.	Terjalannya kerjasama yang efektif sehingga pemahaman mengenai Keuangan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik.	Pelaksanaan literasi keuangan
9	Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (Standar Prosedur Operasional) 01 Des 2026 s/d 31 Des 2026	Penyesuaian dan evaluasi kebijakan & prosedur di bidang Perkeditan	Mendukung program pemerintah untuk berkomitmen dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk dibuatkannya kebijakan.	Telah dilakukannya penyesuaian kebijakan & prosedur di bidang Perkeditan

#### 1.4.2. Road Map dan Program Rencana Lima Tahun (Jangka Panjang)

No	Tahun	Kategori, Jenis, dan Uraian Kegiatan	Target Kegiatan dan Indikator Keberhasilan
1	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank): Menggurangi Penggunaan Kertas	Penghematan dan mendukung program go green Penghematan penggunaan kertas sebesar 5% dibandingkan dengan tahun 2025 dan Peningkatan Utilitas e-office/ email.
2	2026	Pengembangan Kapasitas Intern Bank (Program Pengembangan Pegawai):	Meningkatkan kompetensi pegawai tentang Keuangan Berkelanjutan (Sustainable

		Mengadakan Sosialisasi, Training (inhouse/ public course) atau workshop terkait Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) kepada Internal Pegawai	Finance) Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 1 kali bagi seluruh pegawai dan / atau target training yang telah ditetapkan.
3	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank): Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup (Reminder)	Meningkatkan Awareness tentang Keuangan Berkelanjutan Peningkatan kesadaran pegawai terhadap lingkungan sekitar.
4	2026	Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (Penyesuaian Organisasi): Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan Ditunjuknya Unit Kerja (Unit Bisnis) yang mengelola dan/atau mengkoordinasi seluruh aktivitas Keuangan Berkelanjutan
5	2026	Pengembangan Kapasitas Intern Bank (Program Pengembangan Pegawai): Melakukan evaluasi dan update kebijakan tentang Keuangan berkelanjutan yang telah disusun.	Memiliki SPO Implementasi Keuangan Berkelanjutan yang update dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk kebijakan. Tersusunnya kebijakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan Keuangan berkelanjutan (Disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisari)
6	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Internal Bank): Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan	Meminimalisir penggunaan wadah minuman berbahan plastik yang sulit terurai. Penurunan penggunaan air minum kemasan dan Penggunaan Tumbler/gelas di setiap Rapat dan Pelatihan.
7	2026	Pengembangan Produk dan/atau Jasa (Kredit): Meningkatkan pertumbuhan kredit kepada usaha-usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 1 (satu) % dari portofolio KYD UKM tahun sebelumnya.	Memberantas kemiskinan dan kelaparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya pembiayaan kepada Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) yang Berwawasan Lingkungan.
8	2026	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Eksternal Bank): Pelaksanaan literasi keuangan dan akuisisi nasabah penyimpan dan debitur yang memiliki usaha masuk kategori berkelanjutan.	Terjalinya kerjasama yang efektif sehingga pemahaman mengenai Keuangan berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan literasi keuangan
9	2026	Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (Standar Prosedur Operasional): Penyesuaian dan evaluasi kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan	Mendukung program pemerintah untuk berkomitmen dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk dibuatkannya kebijakan. Telah dilakukannya penyesuaian kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan
10	2027	Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola, dan/atau Standar Prosedur Operasional (Standar Prosedur Operasional): Penyesuaian dan evaluasi kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan	Mendukung program pemerintah untuk berkomitmen dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bentuk dibuatkannya kebijakan. Telah dilakukannya penyesuaian kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan
11	2028	Pengembangan Produk dan/atau Jasa (Kredit): Menambah Produk Keuangan Berkelanjutan	Melakukan kajian-kajian terkait permintaan pasar terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan Telah dilakukan kajian terkait produk

			pembiayaan usaha daur ulang kertas, plastik dan lainnya
12	2029	Kegiatan Lain (Kegiatan untuk Eksternal Bank): Pembelajaran terhadap Debitur	Edukasi kepada debitur kategori kegiatan usaha berkelanjutan  Edukasi kepada debitur terkait kategori kegiatan usaha berkelanjutan
13	2030	Pengembangan Produk dan/atau Jasa (Kredit): Pengembangan portofolio implementasi Keuangan Berkelanjutan	Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun awal implementasi.  Jumlah kredit/pembiayaan Keuangan Berkelanjutan tumbuh 10% dari tahun awal implementasi.

## Alokasi Sumber Daya, Penanggung Jawab, serta Mitra Kerja Sama

### 1.5. Alokasi Sumber Daya untuk Melaksanakan Program Berkelanjutan

BPR akan mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Jumlah Dewan Komisaris	2 Orang
Jumlah Direksi	2 Orang
Jumlah Unit Kerja Utama	1 Orang
Jumlah Unit Kerja Terkait	1 Orang
Jumlah Lainnya	1 Orang

### 1.6. Seluruh Pihak yang Menjadi Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan serta Mitra Kerja Sama

1. Unit Kerja RAKB menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) setiap tahun termasuk bekerjasama dengan satuan kerja terkait khususnya dalam memproyeksikan rencana kegiatan yang masuk dalam kategori Keuangan Berkelanjutan.
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko memastikan penyusunan pedoman perusahaan dalam Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank, melakukan review dan memberikan rekomendasi terkait aspek Kepatuhan terhadap Program Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank. Selanjutnya melakukan monitoring Risiko Bank (Kredit dan Risiko Lainnya) terkait penerapan Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank.
3. Satuan Kerja Personalia, Pendidikan dan Sekretariat melakukan pengembangan kapasitas intern pegawai terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan.
4. Seluruh karyawan menjadi penanggungjawab pelaksanaan program keuangan berkelanjutan.

#### Mitra Regulator:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki peran krusial sebagai pemberi arah dan pengawas implementasi keuangan berkelanjutan di BPR. OJK memberikan kerangka regulasi, pedoman teknis, serta melakukan supervisi berkala terhadap pelaksanaan program keuangan berkelanjutan, termasuk evaluasi laporan dan pemberian insentif regulasi bagi BPR yang berkomitmen pada praktik berkelanjutan. Bank Indonesia mendukung melalui kebijakan makroprudensial, penyediaan skema pembiayaan atau refinancing untuk produk berkelanjutan, serta edukasi manajemen risiko lingkungan dan sosial. Kolaborasi dengan regulator diwujudkan melalui konsultasi rutin, partisipasi dalam program pelatihan dan sosialisasi, pelaporan berkala sesuai format yang ditetapkan, serta koordinasi dalam pengembangan produk pembiayaan hijau yang sesuai dengan kapasitas dan karakteristik BPR.

#### Mitra Lembaga Lain:

Mitra lembaga lain mencakup lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan asosiasi yang memberikan dukungan operasional dan strategis. Bank umum, Bank Pembangunan Daerah, dan sesama BPR menjadi mitra dalam channeling pendanaan, joint financing, serta berbagi best practices implementasi keuangan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Bappeda berperan dalam verifikasi proyek ramah lingkungan, identifikasi calon debitur UMKM berkelanjutan, dan sinkronisasi dengan program pembangunan daerah. Perbarindo (Perhimpunan BPR Indonesia) dan asosiasi UMKM menjadi forum koordinasi antar BPR serta wadah identifikasi dan pembinaan calon debitur yang menjalankan usaha berkelanjutan. Kolaborasi ini memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan melalui sinergi pendanaan, pembinaan, dan alignment dengan program pembangunan daerah yang mendukung pencapaian target ESG BPR.

#### Mitra Konsultan/Fasilitator Eksternal:

Konsultan keuangan berkelanjutan, IT / Digital, dan HR berperan sebagai pendamping teknis dalam transformasi BPR menuju institusi keuangan berkelanjutan. Konsultan keuangan berkelanjutan melakukan assessment kondisi existing terhadap aspek ESG, menyusun roadmap dan action plan, mengembangkan framework penilaian risiko lingkungan dan sosial, serta memberikan pendampingan dalam penyusunan kebijakan, prosedur, dan sistem scoring pembiayaan berkelanjutan. Konsultan IT mengembangkan sistem informasi untuk tracking portfolio berkelanjutan, membangun dashboard monitoring ESG metrics, dan mengintegrasikan sistem pelaporan yang efisien. Konsultan HR merancang program pelatihan keuangan berkelanjutan untuk seluruh level organisasi, mengembangkan

competency framework untuk sustainable finance officer, dan melakukan change management dalam proses transformasi. Keterlibatan para konsultan ini memastikan implementasi yang terstruktur, terukur, dan sesuai dengan standar internasional keuangan berkelanjutan.

**Mitra Lainnya:**

Mitra lainnya seperti universitas, NGO, perusahaan teknologi, lembaga sertifikasi, dan media memberikan dukungan strategis yang memperkaya implementasi keuangan berkelanjutan. Lembaga penelitian dan universitas menyediakan riset, kajian best practices, tenaga ahli sebagai advisor, serta program capacity building dan sertifikasi yang meningkatkan kredibilitas SDM BPR. NGO lingkungan dan lembaga pemberdayaan masyarakat berperan dalam verifikasi proyek ramah lingkungan, identifikasi calon debitur dari komunitas marginal, serta program pemberdayaan UMKM perempuan dan literasi keuangan. Perusahaan teknologi dan fintech menyediakan platform digital untuk akses pembiayaan, solusi payment yang efisien, dan integrasi data untuk assessment risiko ESG. Lembaga sertifikasi memberikan sertifikasi standar internasional (ISO 14001, dll) dan melakukan audit independen untuk meningkatkan kredibilitas eksternal. Media dan komunitas mendukung sosialisasi program, publikasi success stories, dan membangun brand awareness BPR sebagai BPR berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.

## BAB II.

# Proses Penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

### 2.1. Rujukan Keuangan Berkelanjutan

Rujukan yang digunakan sebagai acuan BPR dalam menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) adalah sebagai berikut:

- a. Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015 - 2019.
- b. Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II di Indonesia 2021 - 2025.
- c. Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik tanggal 27 Juli 2017.

### 2.2. Keterlibatan Pihak Penyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam mengembangkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), BPR memilih untuk tidak melibatkan pihak eksternal atau konsultan. Hal ini dilakukan oleh Bagian Bisnis dengan dukungan dari unit-unit kerja yang terkait dengan prioritas implementasi keuangan berkelanjutan. Beberapa unit kerja yang terlibat antara lain:

- a. Pengembangan Produk dan Jasa keuangan berkelanjutan yang melibatkan Divisi Kredit dan Divisi Dana dan Jasa.
- b. Pengembangan Kapasitas Intern yang melibatkan Divisi SDM dan Divisi Umum.
- c. Penyesuaian organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Standar Operasional Prosedur melibatkan Divisi Corporate Secretary, Divisi TSI, Divisi SDM & Umum, Divisi Kepatuhan, Bagian Analisis Kredit dan Bagian SKMR.

Keterlibatan Direksi	1 Orang
Keterlibatan Pejabat	2 Orang
Keterlibatan Konsultan	0 Orang
Keterlibatan Pihak Eksternal Lain	0 Orang

## **BAB III.**

### **Faktor Penentu Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan**

#### **3.1. Rencana Strategis Bank**

Menyesuaikan dengan kondisi pasar pada saat ini BPR akan terus mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Surabaya pada umumnya selain dari kredit utama BPR yang pasarannya adalah pegawai negeri sipil daerah dan kontraktor, maka BPR juga akan membantu kredit UMKM sesuai dengan arah dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Untuk menunjang hal tersebut BPR akan melaksanakan pelatihan–pelatihan kepada para pegawai agar bisa menyesuaikan dengan arah kebijakan ekonomi dan dapat meminimalisir risiko yang akan tumbuh dikemudian hari.

Menyesuaikan dengan kebutuhan pasar maka Bank akan fokus pada peningkatan laba dan selalu memperhatikan RAKB sesuai dengan arahan OJK dengan cara :

1. Penyesuaian prosedur penyaluran kredit.
2. Membangun Desk Layanan Pelanggan dan Call Centre untuk merespon kebutuhan nasabah.

Sesuai dengan visi BPR untuk menjadi Bank berdaya saing tinggi dan kuat di Surabaya BPR mempunyai strategi sebagai berikut :

1. BPR akan melakukan ekspansi bisnis ke kabupaten–kabupaten di Jawa Timur.
2. Ikut serta dalam pemberian kredit sindikasi bersama mitra Bank daerah.
3. Memberikan fasilitas layanan prioritas kepada nasabah.
4. Pembuatan promosi audio maupun video.

## 3.2. Kapasitas Organisasi

### A. Susunan Dewan Komisaris, Pengurus dan Pejabat Eksekutif

#### 1. Struktur Direksi

No	Nama	Jabatan (Status)
1.	Agus Prijo Djatmiko	Direktur Utama
2.	Sri Djuhartini	Direktur yang Membawah Kepatuhan

#### 2. Persyaratan dan Struktur Komisaris

No	Nama	Jabatan (Status)
1.	Erlyani	Komisaris Utama
2.	Isa Satmokuntjoro	Komisaris

#### 3. Pejabat Eksekutif

No	Nama	Jabatan
1.	Erwin Prasetyo	Kabag Marketing
2.	Siti Mubaiyinah	Kabag Operasional
3.	Dhean Eka Prasetya	PE Menrisk & Kepatuhan
4.	Shella Roichatu F	Audit Intern

### B. Jumlah Komposisi SDM (Sumber Daya Manusia)

Seiring persaingan yang semakin meningkat maka dibutuhkan tenaga-tenaga yang berkompeten pada bidang masing-masing BPR juga memperhatikan kesetaraan gender dalam penerimaan pegawai.

1. Demografi Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

No	Level Organisasi	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Direksi	1	1	2	11,11 %
2	Pejabat Eksekutif	2	2	4	22,22 %
3	Pelaksana	8	3	11	66,67 %
	Jumlah	11	7	17	100%

2. Demografi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	S2	0	1	1	5,56 %
2	S1	5	4	9	50 %
3	Lainnya / Tidak Diketahui	6	1	7	44,44 %
	Jumlah	11	6	17	100%

3. Demografi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Demografi			
		L	P	Jumlah	Komposisi
1	Tetap	11	6	17	100 %
	Jumlah	11	6	17	100 %

**C.** Pengembangan Sumber Daya Manusia

BPR dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan training–training untuk pegawai baik itu secara offline maupun online agar BPR dapat mengikuti perkembangan yang ada saat ini.

### 3.3. Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis

Kondisi keuangan PT BPR SURYA DANAKARYA sesuai pada tabel di bawah ini:  
A. Kinerja Keuangan

NO	INDIKATOR	2025 (TW III)	2024	2023
1	Total Aset	26913133	27711765	26633255
2	Modal Inti	9351250	9752742	9157617
3	Kredit Yang diberikan	19292072	19052729	17856659
4	Dana Pihak Ketiga	17126319	17173681	16753162
5	Pendapatan Operasional	4846729	4258564	4000712
6	Beban Operasional	5577354	3486864	3416400
7	Laba Operasional	-739638	676293	507390

#### B. Rasio Keuangan

NO	INDIKATOR	2025 (TW III)	2024	2023
1	Rasio KPMM	65,78	67,3	67,89
2	NPL Gross	31,14	16,16	17,45
3	NPL Net	23,11	12,19	13,28
4	ROA	-3,79	2,9	2,3
5	NIM	11,24	13,61	13,77
6	Rasio BOPO	115,07	81,89	85,39
7	LDR	119,63	115,66	114,81

Faktor- faktor yang mendukung penetapan tujuan dan prioritas Keuangan Berkelanjutan. Faktor- faktor yang disebutkan adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dimiliki ataupun sedang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal BPR bersangkutan. BPR menjelaskan keterkaitan faktor- faktor tersebut dengan upaya BPR dalam merencanakan dan menjalankan program Keuangan Berkelanjutan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa:

1. Rencana strategis bisnis yang telah ada;
2. Kapasitas organisasi yang dimiliki sekarang;
3. Kondisi keuangan dan kapasitas teknis yang dimiliki sekarang;
4. Kerjasama dengan pihak eksternal jika ada;
5. Strategi komunikasi yang ada;
6. Sistem monitoring, evaluasi dan mitigasi yang selama ini dijalankan; dan
7. Kebijakan pemerintah yang terkait dengan isu Keuangan Berkelanjutan.

### 3.4. Strategi Komunikasi

BPR berupaya menciptakan komunikasi yang baik untuk mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif sebagai salah satu faktor pendukung peningkatan kinerja individu pegawai dan perusahaan secara berkelanjutan. Dalam konteks Keuangan Berkelanjutan, BPR terus mengkomunikasikan agar aktivitas operasional untuk lebih mendukung pelestarian lingkungan melalui berbagai inisiatif di antaranya :

1. Melakukan penghematan energi, air, dan kertas
2. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pegawai tentang perilaku hidup ramah lingkungan.

### **3.5. Sistem Monitoring, Evaluasi dan Mitigasi**

Monitoring dilakukan secara periodik untuk memastikan rencana dilaksanakan dan evaluasi terus berjalan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mekanisme monitoring yang dilakukan antara lain:

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam rangka monitoring kondisi terkini.
2. Rapat yang dilakukan secara berkala untuk memonitor kinerja seluruh unit kerja.

### **3.6. Kebijakan Pemerintah, dan Faktor Lainnya**

Pelaksanaan RAKB juga mengacu kepada regulasi dan kebijakan pemerintah.

## BAB IV.

### Prioritas dan Uraian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

#### 4.1. Penyesuaian Organisasi, Manajemen Risiko, Tata Kelola dan/atau Standar Prosedur Operasional yang mendukung Keuangan Berkelanjutan.

##### a. Dasar Pemikiran

Pengembangan dan penguatan organisasi perusahaan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Keuangan berkelanjutan beserta penerapan dan implementasinya dikarenakan organisasi menjadi landasan utama dalam membangun keuangan berkelanjutan. Pelaksanaan keuangan berkelanjutan dimulai dari setiap tatanan organisasi. Komitmen serta dukungan dari Manajemen merupakan salah satu faktor utama yang menjadi penentu dari terlaksananya program- program yang telah direncanakan. Dukungan dari setiap organisasi yang bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya agar selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memberikan pertimbangan kepada Direksi di dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut.

##### b. Rencana Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Periode	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab Kegiatan
1	Penyelenggaraan sosialisasi tentang konsep Keuangan Berkelanjutan	01 Jan 2025 s/d 31 Jan 2025	Dana dan sumber daya manusia	Bagian SDM dan Kepatuhan
2	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup	01 Mar 2025 s/d 31 Mar 2025	SDM	Kepatuhan
3	Efisiensi Penggunaan Listrik	01 Apr 2025 s/d 30 Apr 2025	SDM	Bagian Umum
4	Ketersediaan penanggungjawab pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	01 Mei 2025 s/d 31 Mei 2025	SDM	Direksi
5	Mengurangi Penggunaan Kertas	01 Jul 2025 s/d 31 Jul 2025	SDM	Bagian Umum dan Kepatuhan
6	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan	01 Okt 2025 s/d 31 Okt 2025	SDM	Bagian Kepatuhan
7	Penyesuaian dan evaluasi kebijakan & prosedur di bidang Perkeditan	01 Des 2026 s/d 31 Des 2026	SDM	Bagian Bisnis dan Kepatuhan
8	Mengurangi Penggunaan Kertas	01 Jan 2026 s/d 31 Des 2026	SDM	Bagian Umum dan Kepatuhan
9	Mengadakan Sosialisasi, Training (inhouse/public course) atau workshop terkait Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) kepada Internal Pegawai	06 Jan 2026 s/d 06 Jan 2026	Dana dan sumber daya manusia	Bagian SDM dan Kepatuhan
10	Pembuatan Surat Edaran mengenai pemeliharaan dan menjaga lingkungan hidup (Reminder)	03 Feb 2026 s/d 03 Feb 2026	SDM	Kepatuhan
11	Ketersediaan penanggungjawab	02 Apr 2026 s/d 02	SDM	Direksi

	pengelolaan Keuangan Berkelanjutan	Apr 2026		
12	Melakukan evaluasi dan update kebijakan tentang Keuangan berkelanjutan yang telah disusun.	01 Jun 2026 s/d 01 Jun 2026	SDM	Bagian Kepatuhan
13	Penggunaan Wadah minuman yang ramah lingkungan	01 Agt 2026 s/d 31 Agt 2026	SDM	Bagian Kepatuhan
14	Meningkatkan pertumbuhan kredit kepada usaha-usaha yang masuk dalam kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) sebesar 1 (satu) % dari portofolio KYD UKM tahun sebelumnya.	01 Okt 2026 s/d 31 Okt 2026	SDM	Bagian Bisnis
15	Pelaksanaan literasi keuangan dan akuisisi nasabah penyimpan dan debitur yang memiliki usaha masuk kategori berkelanjutan.	01 Nov 2026 s/d 30 Nov 2026	SDM	Bagian Bisnis
16	Penyesuaian dan evaluasi kebijakan & prosedur di bidang Perkreditan	01 Des 2026 s/d 31 Des 2026	SDM	Bagian Bisnis dan Kepatuhan
17	Menambah Produk Keuangan Berkelanjutan	2028		
18	Pembelajaran terhadap Debitur	2029		
19	Pengembangan portofolio implementasi Keuangan Berkelanjutan	2030		

**c. Sumber Daya**

Pelaksanaan kegiatan di atas membutuhkan dana yang berasal dari dana perusahaan. Kegiatan tersebut di atas akan dilaksanakan oleh Divisi Penanggung Jawab kegiatan dengan melibatkan setiap unsur dalam struktur organisasinya serta membutuhkan masukan dari regulator, Auditor Eksternal maupun lembaga konsultan/praktisi dalam implementasinya.

**d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program**

Proses penilaian akan dilaksanakan dengan merujuk pada parameter dan jadwal yang telah ditetapkan secara komprehensif oleh unit organisasi yang bertanggung jawab.

**e. Tantangan dan Rencana Kedepan**

Tantangan eksternal antara lain adanya perubahan kebijakan pemerintah, kondisi permintaan agregat masyarakat atas program keuangan berkelanjutan dan lain sebagainya.

## BAB V.

# Tindak Lanjut dan Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

### Pegawai, Pejabat dan/atau Unit Kerja yang Bertanggung Jawab terhadap Monitoring dan Evaluasi

1. Pemantauan merupakan aktivitas penting untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan tanggung jawab terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan dilaksanakan secara efektif.
2. Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dilakukan di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan dievaluasi pada akhir setiap periode kegiatan.
3. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas dan pencapaian program, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Peran Direktur Kepatuhan dan kepala divisi terkait dalam hal ini sangat penting.
4. Fungsi Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, sedangkan Manajemen Risiko melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan manajemen risiko.
5. Evaluasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dilakukan di bawah pengawasan Direktur Kepatuhan dan dievaluasi pada akhir setiap periode kegiatan.
6. Sistem evaluasi dan pelaksanaan program aksi bertujuan untuk memantau efektivitas dan pencapaian program, serta mengidentifikasi tindakan yang diperlukan jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan pencapaian, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
7. Direktur Kepatuhan dan Kepala Divisi terkait memantau pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan dari sisi kepatuhan dan aspek hukum, sedangkan Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan risiko kredit dan risiko lainnya terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan kerangka penerapan manajemen risiko.

### 5.2. Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Untuk memastikan efektivitas realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan diperlukan penentuan jangka waktu secara berkala dengan mempertimbangkan koordinasi antara para pihak, standar yang dibuat dalam pelaksanaannya, serta pemahaman yang sama dalam pelaksanaan, maka waktu pengukuran dan penyampaian realisasi Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan antara lain

1. Pemantauan Realisasi Rencana Aksi Keuangan berkelanjutan tahun berjalan
2. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

### 5.3. Tindak Lanjut dari Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan

Dalam hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan belum dapat terimplementasi sesuai harapan dan timeline yang direncanakan, maka bank akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan sosialisasi aksi keuangan berkelanjutan pada tahun berjalan.
2. Mengkaji ulang indikator kinerja yang dipergunakan untuk tahun-tahun berikutnya.
3. Melakukan revisi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelemahan pada penyusunan sebelumnya.

### 5.4. Mitigasi Risiko Dalam Hal Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tidak Dapat Dilaksanakan dengan Baik atau Tidak Mencapai Tujuan yang Diinginkan

Untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan dari pelaksanaan keuangan berkelanjutan, BPR melakukan pemetaan risiko terlebih dahulu atas setiap rencana prioritas sehingga dapat menghasilkan mitigasi risiko.

**A. Sosialisasi Keuangan Berkelanjutan**

Dalam hal memitigasi risiko atas penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan/ atau standar Prosedur Operasional yang mendukung keuangan berkelanjutan maka diperlukan sosialisasi tentang pentingnya keuangan berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan untuk kehidupan saat ini dan generasi yang akan datang, sehingga usaha perbankan yang dijalankan bisa tetap bertahan dan semakin berkembang di masa- masa yang akan datang.

**B. Pengembangan sumber daya manusia dalam mengelola Keuangan Berkelanjutan.**

- a. Meningkatkan kapasitas pegawai agar lebih memahami karakteristik dan keunggulan produk dan/ atau jasa dimaksud. Program ini antara lain untuk pegawai yang bekerja di unit manajemen risiko, pengembangan bisnis dan pelayanan konsumen.
- b. Mulai merancang dan mengimplementasikan program peningkatan kapasitas intern sebelum waktu mulai implementasi. Prioritas ditujukan bagi pengurus bank dan pegawai yang bertanggung jawab terhadap implementasi Keuangan Berkelanjutan. Untuk selanjutnya, target jangka panjang program peningkatan kapasitas intern ditujukan untuk seluruh pegawai karena keberhasilan implementasi Keuangan Berkelanjutan memerlukan dukungan seluruh pegawai.
- c. Menyiapkan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjalankan program- program Keuangan Berkelanjutan. Penyiapan sumberdaya manusia dapat berupa penyesuaian kriteria dalam proses rekrutmen pegawai baru, pelatihan, proses pengayaan, penyesuaian penilaian kinerja dan sistem remunerasi.

**C. Pengembangan dan penyesuaian Produk dana dan Jasa serta layanan perbankan yang mendukung keuangan berkelanjutan.**

- a. Mencermati dan mempertahankan pasar yang diyakini akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan & pemberdayaan sektor binaan UMKM, pariwisata, dan potensi lainnya. Mencermati situasi ini, maka BPR akan melakukan inovasi layanan untuk memudahkan kebutuhan nasabah salah satunya adalah layanan mobil Kas Keliling yang didesain khusus untuk memenuhi transaksi perbankan nasabah di manapun dan kapanpun.
- b. Jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan. Informasi ini memastikan bahwa bank hanya menjual produk dan jasa yang sudah teruji keamanannya melalui penyampaian risiko dan pemilihan mitra bisnis.
- c. BPR memberikan perlindungan dan keamanan produk bagi nasabah dengan memberikan keamanan

dan nyaman dalam setiap fitur layanan kepada nasabah. Fitur layanan akan selalu dikembangkan dengan dukungan sistem teknologi informasi dalam area ketersediaan layanan sistem (system availability), keandalan sistem (system reliability) dan sistem keamanan (cyber security). Penerapan sistem deteksi penipuan (fraud detection system) juga diawasi secara ketat. Diupayakan seluruh produk telah diuji keamanannya, untuk memastikan risiko kerugian yang seminimal mungkin atas produk tersebut, BPR akan selalu memberikan informasi atas semua risiko yang dapat terjadi kepada nasabah sebagai bahan pertimbangan menggunakan produk yang ditawarkan lebih lanjut.

- d. Mengidentifikasi dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan melalui metode survei kepuasan pelanggan terhadap Produk dan/atau Jasa Keuangan Berkelanjutan, dimana survei merupakan salah satu sarana bagi BPR dalam melakukan komunikasi dan pelibatan pemangku kepentingan. Hasil survei dan mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negative akan disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk menunjukkan transparansi dan keseimbangan penyampaian informasi, yang tidak hanya pada dampak positif saja.
- e. BPR akan senantiasa menjaga hubungan baik dengan nasabah sebagai salah satu pemangku kepentingan utama, untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja bank. Selain nasabah, masukan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, masyarakat sekitar, Regulator juga perlu diperhatikan oleh bank.

**D. Penyaluran kredit berbasis lingkungan.**

- a. Mempertahankan dan meningkatkan portofolio pembiayaan yang berdampak positif bagi aspek lingkungan dan sosial.
- b. Meningkatkan kapasitas perbankan dalam memahami risiko lingkungan serta dampak positif dari kredit yang disalurkan.
- c. Memperkuat kolaborasi dan koordinasi bank dengan sektor industri hijau.
- d. Menentukan batas penyaluran kredit minimal yang berlaku bagi internal bank mengingat meski aturan sudah dibuat, tetapi kewajiban terkait dengan jumlah penyaluran kredit minimal yang harus disalurkan belum ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi beban ekosistem terhadap usaha yang dibiayai bank masih tinggi dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan kelestarian lingkungan kurang kuat.
- e. Memberikan insentif kepada debitur yang berada pada kolektibilitas rendah namun secara efektif telah menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan dalam proses bisnisnya dengan mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/kesenjangan sosial atau memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim.

**E. Sarana Prasarana**

Penggunaan sarana dan prasarana yang mendukung aspek keberlanjutan dalam aktifitas operasional Bank. Mitigasi risiko diatas dapat dilakukan dengan mencegah/ membatasi/ mengurangi/ memperbaiki kerusakan lingkungan hidup, peningkatan polusi, limbah, kerusakan ekosistem dan ketidakadilan/ kesenjangan sosial, termasuk pencegahan dan penanganan polusi/limbah, tidak memicu dan berdampak pada konflik sosial, berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan lingkungan hidup dan proses produksi rendah karbon, serta memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim, termasuk pembaruan teknologi hemat energi dan rendah emisi, konservasi sumber daya dan daur ulang, perbaikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

**F. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) yang searah dengan program keuangan berkelanjutan.**

- a. Menempatkan risiko yang ditimbulkan dari aktifitas CSR dibawah monitoring dan evaluasi seorang Direksi demi menekankan perlunya komitmen berkelanjutan dalam melaksanakan aktifitas CSR.
- b. Mitigasi risiko di bidang CSR dilakukan dengan merancang kegiatan CSR yang dikaitkan dengan risiko yang ditimbulkan kemudian akan dilakukan analisa risiko dengan melibatkan divisi- divisi yang

berpotensi terkena risiko.

- c. Menerapkan prinsip bahwa kegiatan CSR yang tepat tanggung-jawab seluruh divisi dan merupakan kegiatan di awal kegiatan bisnis, bukan kegiatan di akhir tahun setelah perusahaan memperoleh profit, sehingga kegiatan CSR yang akan dilaksanakan didasarkan atas perencanaan yang tepat disertai dengan strategi pencapaian yang efektif.

## **5.5. Penutup**

Demikian Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ini disusun untuk menjadi pedoman dan acuan bagi Direksi dalam melaksanakan implementasi Keuangan Berkelanjutan.



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
SURYA DANAKARYA**

**LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN RAKB (RENCANA  
AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN)**

Dengan ini kami menyatakan bahwa: Laporan

RAKB Tahun  
2026 PT BPR SURYA  
DANAKARYA

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Demikian Laporan RAKB Tahun 2026 ini disusun sebagai wujud komitmen Bank dalam rangka menerapkan Keuangan Berkelanjutan untuk mendukung keberlangsungan usaha dan meningkatkan kinerja perbankan yang baik yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan 3P yaitu Profit (Ekonomi), People (Sosial) dan Planet (Lingkungan).

Pandaan, 15 Desember 2025 PT  
BPR SURYA DANAKARYA

Disetujui Oleh

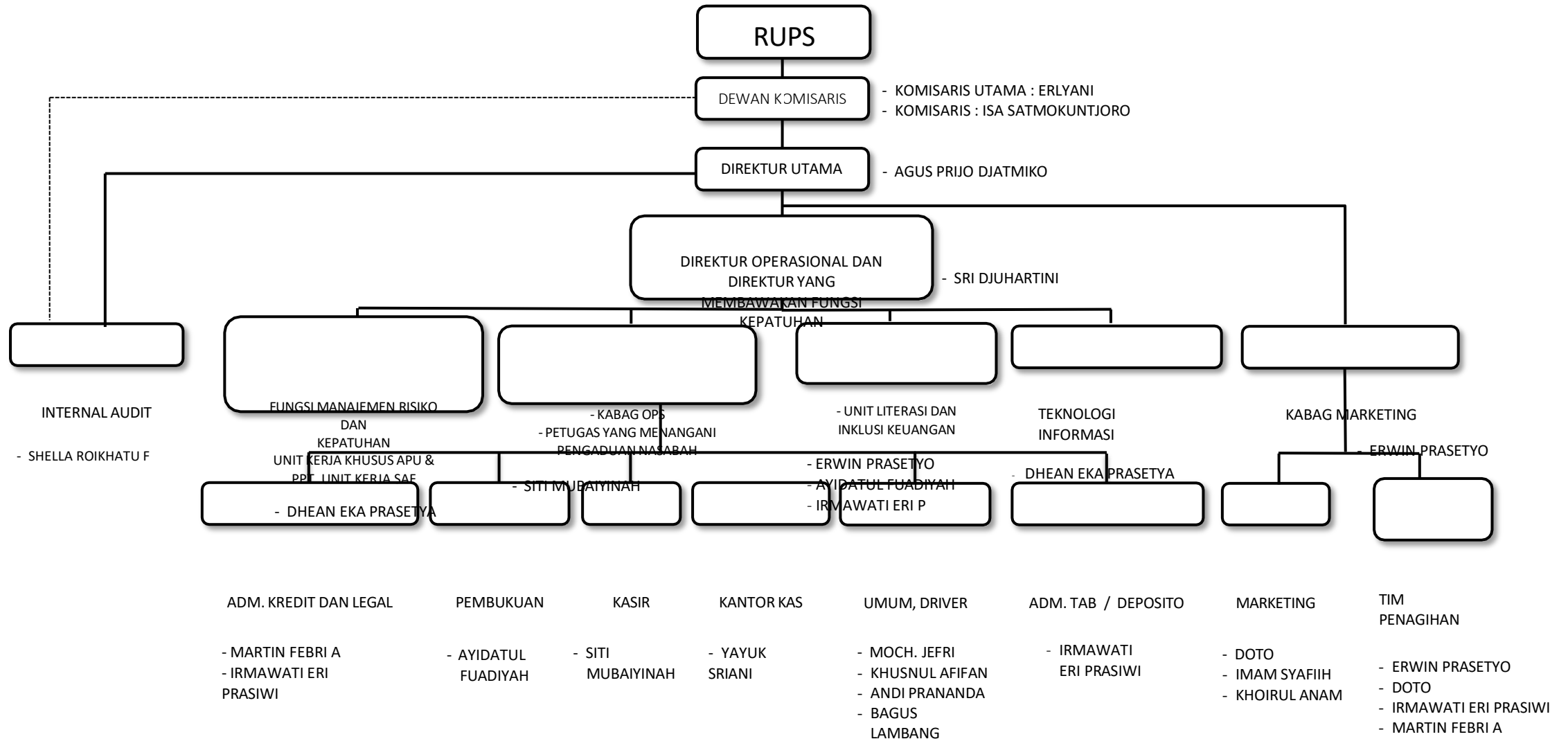
**ERLYANI**  
KOMISARIS UTAMA

**ISA SATMOKUNTJORO**  
KOMISARIS

**AGUS PRIJO DJATMIKO, SE**  
DIREKTUR UTAMA

**SRI DJUHARTINI**  
DIREKTUR

# STRUKTUR ORGANISASI TAHUN 2025 PT. BPR SURYA DANAKARYA



Pandaan, 26 Agustus 2025

Agus Prijo Djatmiko.S.E  
Direktur Utama

Sri Djuhartini  
Direktur

Erlyani  
Komisaris Utama

Isa Satmokuntjoro  
Komisaris



**PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**  
**SURYA DANAKARYA**

Nomor : 092/SDK.K/XII/2025  
Tanggal : 15-12-2025  
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.

**Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Malang**

Jl. Letjen Sutoyo No. 109-111 Lowokwaru MALANG

Perihal : **Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT. BPR Surya Dana Karya Tahun 2026**

Referensi:

1. POJK No. 51/POJK.03/2017 tanggal 27 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Teknis Bagi Bank Terkait Implementasi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, Tahun 2018

Dengan ini kami sampaikan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT. BPR Surya Dana Karya Tahun 2026.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, mohon diterima dengan baik, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PT. BPR Surya Danakarya**

Direksi,

**AGUS PRIJO DJATMIKO, SE**  
DIREKTUR UTAMA